

Etika AI : Otonomi dan tanggung jawab dalam filsafat moral

Salsabila Alya Nurlaili¹, Desta Asswin Haya Nugraha², Yiesha Zakia Rahma Seputro³

^{1,2,3} Program Studi Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 2504011110056@student.uin-malang.ac.id¹, 2504011110061@student.uin-malang.ac.id²,
2504011110062@student.uin-malang.ac.id³

Kata Kunci:

Etika kecerdasan buatan, filsafat moral, otonomi, tanggung jawab, tata kelola etis, teknologi dan masyarakat.

Keywords:

Artificial intelligence ethics, moral philosophy, autonomy, responsibility, ethical governance, technology and society.

ABSTRAK

Perkembangan pesat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pengambilan keputusan publik. Di balik manfaat yang ditawarkan, AI juga memunculkan persoalan etis yang kompleks, terutama terkait dengan konsep otonomi dan tanggung jawab dalam perspektif filsafat moral. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana otonomi dan tanggung jawab moral dapat dipahami dalam konteks penggunaan dan pengembangan teknologi AI. Melalui pendekatan kualitatif-filosofis dengan metode analisis konseptual dan kajian literatur, penelitian ini menelusuri perdebatan etis seputar sejauh mana sistem AI dapat dianggap memiliki otonomi dalam bertindak serta siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab atas keputusan dan dampak yang ditimbulkannya. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun AI mampu melakukan pengambilan keputusan secara mandiri berbasis algoritma dan pembelajaran mesin, otonomi yang dimilikinya tetap bersifat terbatas dan bergantung pada desain, data, serta tujuan yang ditetapkan oleh manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab moral atas tindakan AI tidak dapat sepenuhnya dialihkan kepada mesin, melainkan harus tetap melekat pada para pengembang, pengguna, dan institusi yang mengoperasikannya. Dengan mengintegrasikan perspektif etika deontologis, utilitarianisme, dan etika kebajikan, artikel ini menegaskan pentingnya kerangka etika komprehensif dalam pengembangan AI agar teknologi tersebut dapat berkontribusi secara adil, aman, dan bertanggung jawab bagi kesejahteraan manusia dan masyarakat secara luas.

ABSTRACT

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has brought significant transformations across various sectors, including economics, education, healthcare, and public decision-making. Alongside its numerous benefits, AI also raises complex ethical challenges, particularly concerning the concepts of autonomy and responsibility within moral philosophy. This article aims to critically examine how autonomy and moral responsibility can be understood in the context of AI development and deployment. Employing a qualitative-philosophical approach through conceptual analysis and literature review, this study explores ethical debates regarding the extent to which AI systems can be considered autonomous agents and who should be held accountable for the decisions and impacts generated by such systems. The findings indicate that although AI systems are capable of making independent decisions based on algorithms and machine learning processes, their autonomy remains fundamentally limited, as it is shaped by human-designed architectures, training data, and predefined objectives. Consequently, moral responsibility for AI-driven actions cannot be fully attributed to machines but must primarily rest with developers, users, policymakers, and institutions that design, deploy, and regulate these technologies. By integrating perspectives from deontological ethics, utilitarianism, and virtue ethics, this article emphasizes the importance of establishing a comprehensive ethical framework for AI governance. Such



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

a framework is essential to ensure that AI technologies are developed and implemented in ways that promote justice, safety, accountability, and the overall well-being of individuals and society.

Pendahuluan

Kecerdasan buatan kini telah menjadi elemen yang termasuk penting, namun cara AI dapat secara otomatis membuat Keputusan yang dapat menimbulkan masalah etika yang kompleks karena Keputusan tersebut sangat memengaruhi kehidupan untuk manusia. Kemandirian AI yang dapat beroperasi secara mandiri menarik perhatian, karena dapat memicu pemikiran tentang sejauh mana AI dapat menyelesaikan rangkaian tugas dan bagaimana kita perlu mengawasi serta mengendalikan teknologi ini agar tidak bertentangan dengan moral yang kita ikuti. Kecerdasan buatan (AI) memainkan peran sentral dalam revolusi teknologi modern dan menjajikan kemajuan besar dalam banyak bidang kehidupan manusia. Namun, dalam fitur yang menegaskan, terdapat pertanyaan mendalam mengenai implikasi moral dari pengembangan dan penerapan teknologi. (Adriyansa et al., 2024). Kajian prinsip moral berperan besar dalam mengkaji isu dalam hal ini, terutama Ketika orang mulai menyerahkan beberapa pilihan kepada perangkat yang dapat belajar, berubah dan melakukan berbagai hal tanpa adanya pemberitahuan persis apa yang harus dilakukan (Mittelstadt et al., 2016).

Perkembangan kecerdasan buatan sudah memberikan dampak yang cukup besar terhadap berbagai sektor dalam kehidupan. Dengan adanya kemampuan dalam mengolah data dalam jumlah besar. AI sudah membuktikan bahwa dapat bekerja dengan efisiensi dan bekerja dengan produktivitas dalam berbagai bidang. Tetapi, dalam manfaatnya yang luar biasa AI banyak menimbulkan berbagai masalah dan tantangan etika atau moral yang membutuhkan penanganan yang serius. Selain dalam hal itu, pertanyaan tentang tanggung jawab moral dalam pengembangan dan penerapan AI semakin relevan. Siapa yang bertanggung jawab?. Permasalahan ini memperlihatkan perlunya aturan yang jelas dan pendekatan etika yang menyeluruh dalam pengembangan AI.

Bukan pada umumnya seperti teknologi yang sudah lampau yang hanya berfokus terhadap mediasi atau peningkatan Indera serta kapasitas fisik pengguna, Kemajuan saat ini dapat sebagai alternatif yang bisa menyisihkan kemampuan berpikir dan memiliki peran untuk ikut dalam pengambilan Keputusan dalam hidup. Apabila manusia menyerahkan kendali pengambilan Keputusan kepada AI, manusia juga akan merasakan dampaknya yang akan mengabaikan pemahaman tentang sebuah proses pengambilan Keputusan.

Mendefinisikan Otonomi

Dalam etika, otonomi merupakan konsep dasar yang mengacu pada kemampuan individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip yang ditetapkan, bukan karena tekanan dari luar. Immanuel Kant dalam *Groundwork of the Metaphysics of Morals* menegaskan bahwa otonomi Adalah persyaratan mutlak untuk moralitas : hanya makhluk rasional yang mampu bertindak berdasarkan hukum moral yang mereka buat sendiri yang dapat dianggap sebagai agen moral.

Kecerdasan buatan otonom merupakan cabang dari AI yang system dan strukturanya cukup mumpuni untuk berfungsi dalam pengawasan dan keterkaitan manusia. Penanganan yang bisa di lakukan system AI otonom berkisar dari mengoptimalkan tugas dasar dan berulang sehingga dapat menganalisis Kumpulan data(Setiawan, 2018).

Para filsuf dan ahli etika telah menunjukkan bahwa menggunakan kata yang sama “otonomi” untuk mesin dan manusia dapat menyesatkan. Otonomi mesin AI lebih seperti otomatisme yang lebih canggih. Seiring waktu system yang terdapat dalam AI dapat menjadi otonom dalam arti oprasional, Masyarakat terpaksa bergulat dengan batas-batas otonominya. Otonomi AI saat ini kuat dalam eksekusi tetapi hampa dalam moral, sebuah poin Ketika kita beralih terhadap pertanyaan mengenai tanggung jawab dan akuntabilitas.

Saat konsep ini diterapkan dalam kecerdasan buatan (AI) terdapat ketegangan epistemologis dan ontologis yang tertera. AI mampu melaksanakan tugas-tugas rumit secara mandiri seperti membuat Keputusan, belajar dari informasi, dan mengadaptasi perilaku, namun tidak memiliki kesadaran, kebebasan berkehendak atau kemampuan reflektif (Ali, 2023). Oleh sebab itu, otonomi AI bersifat fungsional atau instrumental, bukan moral seperti yang dijelaskan dalam Gunkel(2012) : AI tidak memiliki subjektif atau pendirian moral, sehingga tidak bisa di pandang sebagai subjek etika dalam pengertian yang konvensional.

Floridi dan Cowls (2019) mengusulkan kerangka kerja etika AI yang menekankan prinsip-prinsip seperti otonomi, keadilan, dan akuntabilitas, tetapi mereka menegaskan jika prinsip otonomi dalam konteks ini lebih mengarah terhadap penghormatan pada otonomi manusia dalam interaksi dengan system AI, dan bukan terhadap otonomi AI tersebut.

Tanggung Jawab Moral dan AI

Tanggung jawab secara umum artinya kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatannya, baik dilakukan dengan kesengajaan ataupun tidak di sengaja. Intinya ada kewajiban yang harus harus terpenuhi. Tanggung jawab moral yaitu bentuk tanggung jawab yang berasal dari hati Nurani dan nilai dalam moral yang Dimana orang itu dapat melakukan sesuatu karena orang tersebut merasa dirinya benar, dan bukan atas dasar hukuman.

Tanggung jawab moral dalam filsafat mengandalkan adanya beberapa komponen utama yaitu kesadaran, niat serta pemahan terhadap resiko, dalam konteks tersebut, seseorang diyakini dapat bertanggung jawab dalam hal moral jika saja mengetahui perbuatannya, mempunyai control atasnya dan dapat memahami dampak dari orang lain. Namun AI tidak memenuhi ciri-ciri ini. AI tidak mempunyai kesadaran diri, tidak mempunyai niat dalam arti psikologis dan tidak dapat memahami akibat moral dari Tindakan.

Namun, sifat system AI pada saat ini yang kompleks, utamanya pada hal yang berbasis pembelajaran mesin, membuat siapa saja yang bertanggung jawab menjadi tidak pasti, Contohnya dalam kejadian kecelakaan yang melibatkan mobil tanpa

pengemudi, jadi kita sulit untuk menemukan siapa yang harus dimintai untuk bertanggung jawab. Dalam masalah ini para filsuf etika teknologi mengemukakan tulisan bertema tanggung jawab Bersama. Gagasan tidak ditimpakan terhadap satu orang saja, namun baiknya disebar luaskan. Floridi dan COWLS (2019)

Beberapa filsuf telah mengeksplorasi apa yang diperlukan agar AI dapat di akui bertanggung jawab secara moral. Miguel Ángel Sebastián (2021) berpendapat bahwa meskipun AI suatu hari nanti dapat memenuhi kondisi control dan pengetahuan. James Moor (2006) dalam artikelnya tentang machine ethics memberikan statement meskipun AI dapat diprogram untuk mengikuti aturan etis, hal ini tidak serta merta mereka menjadikan agen moral, ia membedakan antara implicit ethical agents (AI yang mengikuti aturan etis).

Etika dan Regulasi AI : Siapa yang Bertanggung Jawab?

Menurut Jobin (2020) dan rekanya dalam jurnal Nature Machine Intelligence, AI yang benar etis harus berlandaskan : transparansi, keadilan dan akuntabilitas, jadi para pembuat AI wajib untuk menjelaskan system kerja. Dalam negara ini aturan dalam etika AI cukup awam bagi banyak Masyarakat, banyak yang menyalahgunakan keberadaan AI untuk menampilkan atau membuat berbagai video atau foto. Peran dan kolaborasi antara pemerintah dan pengguna teknologi sangat dibutuhkan saat ini, pemerintah mengatur pengembangan dan memastikan sistemnya etis. Siebert et al. (2021) mengembangkan konsep meaningful human control, yang menekankan bahwa sistem AI harus dirancang sedemikian rupa agar keputusan penting tetap berada dalam kendali manusia. Prinsip ini bertujuan menutup kesenjangan tanggung jawab dan memastikan bahwa otoritas moral tidak sepenuhnya diserahkan kepada algoritma.

Permasalahannya, dalam negara ini peraturan mengenai etika AI masih sangat tidak memiliki kejelasan. Banyak pengguna AI untuk membuat konten palsu, memanipulasi data atau mengambil data orang lain tanpa seizin mereka, namun hukum dalam negara kita belum sepenuhnya mampu menjalani seperti perkembangan saat ini. Sementara pada negara seperti di Uni Eropa sudah lama menerapkan AI Act (2024), merupakan regulasi ketaatan untuk pemanfaatan AI. Dari perspektif etika normatif, tanggung jawab AI dapat dianalisis melalui tiga pendekatan utama: deontologi, utilitarianisme, dan etika kebajikan. Pendekatan deontologis menekankan kewajiban moral untuk melindungi martabat manusia, sementara utilitarianisme berfokus pada dampak terbesar bagi kesejahteraan sosial. Etika kebajikan menekankan pembentukan karakter moral dalam pengembangan dan penggunaan AI (Saraiva, 2024). Paus Fransiskus bahkan menyerukan regulasi global AI yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas, serta memperingatkan potensi “bayangan kejahatan” dalam penyebaran teknologi tanpa kontrol moral (Reuters, 2025). Seruan ini menunjukkan bahwa persoalan AI tidak semata bersifat teknis, tetapi juga menyentuh dimensi etis, spiritual, dan peradaban manusia.

Tata Kelola merujuk terhadap Langkah-langkah organisasi dalam memantau siklus hidup dalam AI melalui kebijakan dan prosedur internal, sumber daya manusia dan system. Tata Kelola berfungsi bahwa system AI beroperasi sejalan dengan prinsip dan

nilai yang diharapkan oleh suatu organisasi, sejalan dengan harapan para pemangku kepentingan, serta sesuai dengan adanya peraturan yang berlaku.

Kesimpulan dan Saran

Pertumbuhan yang pesat terhadap kecerdasan buatan sudah banyak menimbulkan rintangan dalam ranah etika dan filsafat moral. Dalam artikel ini menegaskan bahwa meskipun AI bisa menyimpulkan keputusan sendiri. AI tidak mempunyai kesadaran, niat dan pemahaman tentang moral sehingga tidak dianggap sebagai otonom secara moral.

Di isu tanggung jawab, menegaskan bahwa kecerdasan buatan tidak bisa diberi pertanggung jawaban moral dikarenakan dia tidak mempunyai kemauan reflektif atau kesadaran. Tanggung jawab moral harus tetap berada dalam manusia, terutama pada pengembang, institusi, pemerintah dan pengguna teknologi. Secara keseluruhan, menyimpulkan perkembangan Kecerdasan buatan juga penting untuk diimbangi dengan pemahaman yang matang dan regulasi yang menyeluruh agar teknologi dapat berkembang secara baik dan aman.

Daftar Pustaka

- Ali, M. (2023). Ethics of AI in Islamic Perspective. *Journal of Islamic Ethics*, 05, 56.
- Adriyansa, A., Herinda, P. B., & Sutabri, T. (2024). Analisis Filosofis atas Konsep Kecerdasan Buatan dalam Konteks Etika Teknologi. *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains ...*, 2(June), 154–159
- Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press
- Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A Unified Framework of Five Principles for AI in Society
- Moor, J. H. (2006). The Nature, Importance, and Difficulty of Machine Ethics. *IEEE Intelligent Systems*.
- Gunkel, D. J. (2012). *The Machine Question: Critical Perspectives on AI, Robots, and Ethics*. MIT Press.
- Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, 3(2), 2053951716679679. <https://doi.org/10.1177/2053951716679679>
- Setiawan, D. (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1474>
- Kant, I. (1785). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*.
- Sebastián, Miguel Ángel. First-person representations and responsible agency in AI. PMC.
- obin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2020). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 2(7), 389-399.
- Yosifyaesthercaroline. (2024). Tanggung jawab moral dalam penggunaan AI di kehidupan sehari-hari. Kompasiana.

Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, 3(2), 1–21